

## RESEARCH ARTICLE

# Pengaruh Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah, Varians Belanja, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA) Terhadap Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Melisa Astorima Toraja<sup>1\*</sup>, Zulkifli<sup>2</sup>, Riana Mayasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Email: melisaastorima110503@gmail.com<sup>1\*</sup>, zulkifliwancik@polsri.ac.id<sup>2</sup>, riana.mayasari@polsri.ac.id<sup>3</sup>

## Histori Artikel:

Dikirim 13 Agustus 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 September 2025; Diterima 10 November 2025; Diterbitkan 1 Desember 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

## Suggested citation:

Toraja, M. A., Zulkifli, Z., & Mayasari, R. (2025). Pengaruh Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah, Varians Belanja, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA) Terhadap Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5766-5777. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.5346>.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dengan menganalisis variabel Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah, Varians Belanja, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD serta data APBD murni dari tahun 2019 - 2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, dengan total sampel sebanyak 85 observasi dari 13 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pengujian hipotesis ini menggunakan Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, Kapasitas Manajemen Keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,839 yang artinya > 0,05, dapat dinyatakan bahwa variabel tidak berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran. sedangkan Varians Belanja memiliki nilai signifikansi 0,046 dan P-SiLPA memiliki nilai signifikansi 0,038 yang artinya < 0,05, sehingga dapat dinyatakan kedua variabel berpengaruh positif signifikan terhadap Perubahan Anggaran. Berdasarkan nilai koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,369, hal ini berarti sebesar 36,9 % variasi dalam Perubahan Anggaran dapat dijelaskan oleh variabel Kapasitas Manajemen Keuangan, Varians Belanja, dan P-SiLPA. Sementara itu, sisanya yakni 63,1 % dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain di luar variabel yang dianalisis pada penelitian ini. Ketiga variabel penelitian tersebut menegaskan bahwa PAD, SiLPA, dan varians belanja memiliki peran strategis dalam memengaruhi perubahan anggaran, terutama dalam konteks belanja modal dan belanja daerah secara umum.

**Kata Kunci:** Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah; Varians Belanja; Perubahan Sisa lebih Perhitungan Anggaran; Perubahan Anggaran; Pemerintah Provinsi.

## Abstract

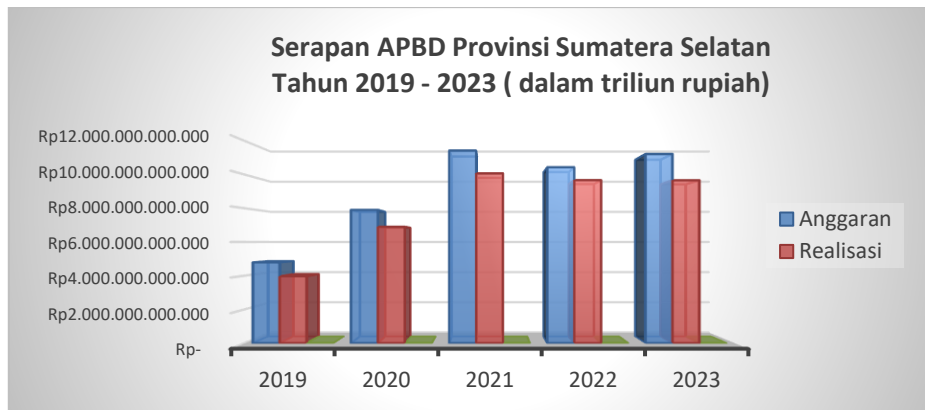
This study aims to determine the factors that cause budget changes by analyzing the variables of Regional Financial Management Capacity, Expenditure Variance, and Changes in Budget Calculation Surplus on Budget Changes of Regency/City Governments in South Sumatra Province. This study uses a quantitative approach with secondary data obtained from the Audit Report of the Republic of Indonesia Supreme Audit Agency BPK RI on LKPD and pure APBD data from 2019 - 2023. The sampling technique uses saturated samples, with a total sample of 85 observations from 14 Regencies and 3 Cities in South Sumatra Province. This hypothesis testing uses Multiple Linear Regression. The results of this study indicate that partially, Financial Management Capacity has a significance value of 0.839 which means > 0.05, it can be stated that the variable has no effect on Budget Changes. while Expenditure Variance has a significance value of 0.046 and P-SiLPA has a significance value of 0.038 which means < 0.05, so it can be stated that both variables have a significant positive effect on Budget Changes. Based on the coefficient of determination, a value of 0.369 was obtained, meaning that 36.9% of the variation in Budget Changes can be explained by the variables of Financial Management Capacity, Expenditure Variance, and P-SiLPA. Meanwhile, the remaining 63.1% is influenced by a number of other factors outside the variables analyzed in this study. These three research variables confirm that PAD, SiLPA, and expenditure variance have a strategic role in influencing budget changes, especially in the context of capital expenditure and regional expenditure in general.

**Keyword:** Regional Financial Management Capacity; Spending Variance; Changes in Budget Calculation Surplus; Budget Changes; Provincial Government.

RESEARCH ARTICLE

## 1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam perencanaan dan pengalokasian dana untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (2020), anggaran belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan mencerminkan kualitas pelayanan publik serta prioritas pembangunan yang direncanakan. Perubahan anggaran belanja menggambarkan perubahan target pelayanan publik dan orientasi pembangunan jangka pendek. Anggaran merupakan dana yang diperoleh dalam jumlah dan waktu tertentu untuk merealisasikan program, dan tingkat serapannya menunjukkan efektivitas pelaksanaan. Rendahnya penyerapan APBD dapat disebabkan oleh penyelewengan, kesalahan sistem manajemen, masalah pajak, atau SDM yang lemah, sehingga menyebabkan program tidak berjalan sesuai rencana. Data Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019–2023 diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan lima tahun terakhir.



Gambar 1. Serapan APBD

Selama periode 2019–2023, terjadi fluktuasi dalam penyerapan anggaran daerah. Pada tahun 2019, dari anggaran Rp4,78 triliun, realisasi mencapai Rp3,96 triliun atau sebesar 82,80%. Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan peningkatan nominal anggaran dan realisasi, namun persentase penyerapan hanya sedikit naik menjadi 87,33% dan 88,17%. Puncak efisiensi terjadi pada tahun 2022 dengan penyerapan tertinggi 92,68% dari anggaran Rp10,43 triliun. Namun, pada tahun 2023, meskipun anggaran naik menjadi Rp11,21 triliun, penyerapan menurun menjadi 86,13%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran tidak selalu diikuti oleh efisiensi pelaksanaan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah (Martini dkk., 2019). Penurunan serapan anggaran di Provinsi Sumatera Selatan disebabkan oleh hambatan pelaksanaan program, perencanaan yang kurang matang, serta kendala teknis dan administratif. Rendahnya serapan ini berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dan terganggunya program-program pembangunan yang telah direncanakan. Contohnya terjadi di Kabupaten OKU dan OKU Timur pada tahun 2023, yang mengalami peningkatan signifikan dalam APBD perubahan akibat tambahan penerimaan dari pemerintah pusat, perubahan kebijakan bagi hasil pajak, serta bantuan keuangan dari provinsi untuk infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Di tingkat provinsi, APBD perubahan tahun 2022 meningkat menjadi Rp10,76 triliun dari Rp10,12 triliun. Peningkatan ini mencerminkan adanya tambahan pendapatan daerah dan penyesuaian belanja daerah untuk mendukung program-program pembangunan dan pelayanan publik.

## RESEARCH ARTICLE

Sementara itu, pandemi Covid-19 mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Kota Palembang, untuk melakukan refocusing dan realokasi APBD secara besar-besaran. Anggaran penanganan pandemi di Palembang naik dari Rp200 miliar menjadi Rp480 miliar, sebagian besar berasal dari pergeseran dana dan Belanja Tidak Terduga. Kebijakan rasionalisasi APBD berdasarkan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan mewajibkan pemotongan minimal 50% pada belanja barang/jasa dan modal. Hal ini memengaruhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena turunnya aktivitas ekonomi, seperti pariwisata dan pajak restoran, akibat pembatasan sosial. Untuk mengatasi defisit anggaran, pemerintah daerah diperbolehkan menggunakan dana kas atau menjadwalkan ulang program-program lain dalam APBD. Perubahan anggaran merupakan fenomena yang umum terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2019–2023, dengan latar belakang yang beragam di tiap daerah. Hal ini penting untuk diteliti karena dokumen perubahan APBD tidak tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga faktor-faktor yang memengaruhi perubahan anggaran menjadi krusial untuk dianalisis demi efektivitas APBD. Beberapa faktor yang memengaruhi perubahan anggaran antara lain kapasitas manajemen keuangan daerah, varians belanja, dan perubahan SILPA. Kapasitas manajemen keuangan, yang diukur melalui rasio kemandirian keuangan, mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara mandiri. Sementara itu, varians belanja yang tinggi menunjukkan ketidakefisienan pelaksanaan anggaran, dan perubahan SILPA menggambarkan ketidakpastian dalam penetapan penerimaan pembiayaan, yang pada akhirnya memengaruhi belanja daerah. Sehingga, penelitian ini dinilai penting untuk dilaksanakan sebagai upaya mengisi kekosongan dalam literatur yang ada.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*agency theory*) yang menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal (masyarakat/pemangku kepentingan) dan agen (pemerintah daerah) dalam pengelolaan keuangan publik. Teori ini menyatakan bahwa agen memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kepentingan prinsipal, meskipun keduanya memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan agar agen bertindak akuntabel dan transparan dalam menyajikan informasi keuangan. Pemerintah sebagai agen bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan yang lengkap, wajar, dan dapat dipercaya guna membangun kepercayaan publik. Ketika kepentingan pribadi mendominasi, agen cenderung memanipulasi informasi agar kinerjanya tampak baik, yang dalam konteks pemerintahan dapat menurunkan kualitas akuntabilitas publik.

### 2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan milik pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (2022), penyusunan APBD berpedoman pada kebijakan pokok yang menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun, membahas, dan menetapkannya. Selain sebagai dokumen perencanaan keuangan, APBD juga berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait prioritas alokasi anggaran. Secara substansi, APBD digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Menurut Masnila *et al.* (2021), pemerintah daerah harus menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, karena akuntabilitas diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan berkualitas bagi publik. Mayasari (2022) menambahkan bahwa akuntabilitas kinerja adalah tanggung jawab pemerintah atas program dan kegiatan yang terselesaikan.

### 2.3 Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen keuangan merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup pengelolaan dana, mulai dari perolehan sumber pembiayaan, pemanfaatan secara efisien, hingga pengalokasian dana yang tepat (Armereo dkk., 2020). Dalam lingkup pemerintahan daerah, konsep ini diterapkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah rasio kemandirian keuangan. Rasio ini mencerminkan sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhannya secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal (Oki *et al.*, 2020). Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin kecil ketergantungan terhadap dana dari luar. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan eksternal (Pangestu & Andriana, 2022). Rasio Kemandirian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{(\text{Pendapatan Asli Daerah})}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### 2.4 Varians Belanja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), varians anggaran adalah selisih antara jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD/APBN dengan realisasi aktual atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam satu periode akuntansi. Varians pengeluaran (belanja) merupakan selisih antara anggaran belanja dan realisasi belanja pada akhir tahun. Varians belanja terjadi ketika target belanja tidak tercapai pada saat realisasi akhir tahun. Menurut Mahmudi (2019), berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, terdapat beberapa jenis analisis belanja yang dapat dilakukan, salah satunya adalah analisis varians belanja, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Varians ini dapat memicu pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap metode perencanaan dan penganggaran yang digunakan, serta menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan perubahan anggaran (APBD-P) di tahun berjalan.

$$\text{Varians Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

### 2.5 Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SILPA)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 1 angka 48), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan daerah (termasuk penerimaan pembiayaan) dengan realisasi belanja daerah (termasuk pengeluaran pembiayaan) sepanjang satu periode anggaran. Adanya SILPA yang cukup besar mengindikasikan ketidaktepatan pemerintah daerah dalam melakukan penganggaran, sehingga dana yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda. Dalam penyusunan APBD, jumlah SILPA yang ideal adalah mendekati nol, yang berarti penerimaan pembiayaan dapat menutup defisit secara optimal atau surplus terkendali. SILPA yang terlalu besar juga dapat menunjukkan lemahnya kapasitas serapan anggaran oleh perangkat daerah (Amelia & Khoiriawati, 2022). Perubahan SILPA (P-SILPA) menggambarkan fluktuasi atau selisih SILPA dari tahun ke tahun, yang mencerminkan tingkat ketidakpastian perencanaan anggaran serta efektivitas pengendalian keuangan daerah. P-SILPA yang tinggi (baik positif maupun negatif) menandakan rendahnya akurasi peramalan pendapatan dan belanja. Rumus penghitungan SILPA dan Perubahan SILPA adalah sebagai berikut:

$$\text{P-SILPA} = \frac{\text{Silpa Setelah Perubahan APBD} - \text{Anggaran SILPA dalam APBD Murni}}{\text{Anggaran SILPA Dalam APBD Murni}}$$

### 2.6 Perubahan Anggaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan atau APBD-P) merupakan penyesuaian terhadap APBD murni yang telah ditetapkan sebelumnya, baik pada sisi pendapatan,

RESEARCH ARTICLE

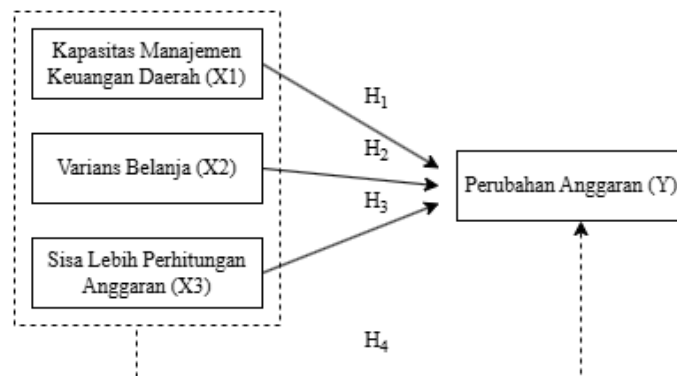
belanja, maupun pembiayaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dilakukan apabila terjadi:

- 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA),
- 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, atau antarkegiatan,
- 3) keadaan darurat atau keadaan luar biasa (*force majeure*), serta
- 4) adanya tambahan atau pengurangan pendapatan dan belanja yang signifikan.

Rebudgeting atau perubahan anggaran merupakan bagian penting dari proses penganggaran yang bertujuan menyesuaikan atau mengoreksi anggaran awal agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien (Fahrinda & Kuntadi, 2022). Pola perubahan anggaran yang dilakukan secara rutin setiap tahun cenderung mencerminkan ketidakakuratan perencanaan awal, kecuali dalam kondisi luar biasa seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan kebijakan pusat yang signifikan. Besaran perubahan anggaran dapat diukur dari selisih antara anggaran belanja pada APBD murni dengan anggaran belanja pada APBD Perubahan (Kurniawan & Arza, 2019). Rumus yang umum digunakan adalah:

$$\text{Perubahan Anggaran} = \frac{\text{Anggaran Belanja PAPBD} - \text{Anggaran Belanja dalam APBD Murni}}{\text{Anggaran Belanja dalam APBD Murni}}$$

Penelitian terdahulu menjadi acuan penting dalam pengembangan teori dan temuan empiris terkait perubahan anggaran belanja daerah. Kurniawan dan Arza (2019) menguji pengaruh fiscal stress, varians anggaran, serta perubahan SILPA terhadap perubahan anggaran belanja daerah dan menemukan bahwa hanya perubahan SILPA yang berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan fiscal stress dan varians anggaran tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Novelsyah dan Nor (2022) yang mengembangkan model prediksi perubahan anggaran belanja daerah dan menyimpulkan bahwa varians pendapatan, varians belanja, dan akumulasi surplus justru berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi temuan yang dipengaruhi oleh perbedaan periode pengamatan, lokasi penelitian, serta variabel yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menguji kembali hubungan tersebut pada konteks Provinsi Sumatera Selatan periode 2019–2023 dengan menambahkan variabel kapasitas manajemen keuangan daerah sebagai variabel independen baru, sehingga diharapkan dapat mengatasi kesenjangan temuan sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih komprehensif.



Keterangan :

- > : Uji Secara Parsial
- - - - -> : Uji Secara Simultan

Gambar 2. Kerangka Penelitian

## RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, perubahan anggaran belanja daerah (sebagai variabel dependen) dipengaruhi oleh tiga variabel independen, yaitu kapasitas manajemen keuangan daerah, varians belanja, dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SILPA). Ketiga variabel tersebut diduga memiliki pengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat perubahan anggaran belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2019–2023. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1)  $H_1$ : Kapasitas manajemen keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja daerah.
- 2)  $H_2$ : Varians belanja berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja daerah.
- 3)  $H_3$ : Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SILPA) berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja daerah.
- 4)  $H_4$ : Kapasitas manajemen keuangan daerah, varians belanja, dan perubahan SILPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja daerah.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif, dengan tujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel independen yaitu Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah, Varians Belanja, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap variabel dependen yaitu Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan kuantitatif ini digunakan karena data yang dianalisis berbentuk angka dan pengujian dilakukan secara statistik (Sugiyono, 2021).

#### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 17 daerah. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Dengan periode pengamatan selama lima tahun (2019–2023), jumlah total observasi yang dianalisis adalah sebanyak 85 data (17 kabupaten/kota × 5 tahun) (Sugiyono, 2021).

#### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari dokumen resmi seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh BPK RI, serta data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni masing-masing kabupaten/kota untuk periode 2019 hingga 2023.

#### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan data secara umum, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial antar variabel, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, uji F, dan analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan bantuan software SPSS versi 26.

RESEARCH ARTICLE

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil

Tabel 1. Hasil Pengujian Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kapasitas Manajemen Keuangan (X1)	85	,027	,864	,09666	,104111
Varians Belanja (X2)	85	,720	1,231	,89958	,058775
Perubahan SiLPA (X3)	85	-,910	,995	,33766	,340101
Perubahan Anggaran (Y)	85	-,093	,910	,21332	,180409
Valid N (listwise)	85				

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa hasil statistik deskriptif memperoleh nilai minimum, nilai maksimum, nilai tengah, dan standar deviasi sebagai berikut:

- 1) Variabel Y menunjukkan hasil nilai minimum -0,093, nilai maksimum 0,910, nilai rata-rata sebesar 0,21332, dan nilai standar deviasi statistic 0,180409.
- 2) Variabel X1 menunjukkan hasil nilai minimum 0,027, nilai maksimum 0,864, nilai rata-rata sebesar 0,39958, dan nilai standar deviasi statistic 0,104111.
- 3) Variabel X2 menunjukkan hasil nilai minimum 0,720, nilai maksimum 1,231, nilai rata-rata sebesar 0,89958, dan nilai standar deviasi statistic 0,058775.
- 4) Variabel X3 menunjukkan hasil nilai minimum -0,910, nilai maksimum 0,995, nilai rata-rata sebesar 0,33766, dan nilai standar deviasi statistic 0,180409.

Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,0101197
	Std. Deviation	,71844670
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,052
	Negative	-,075
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

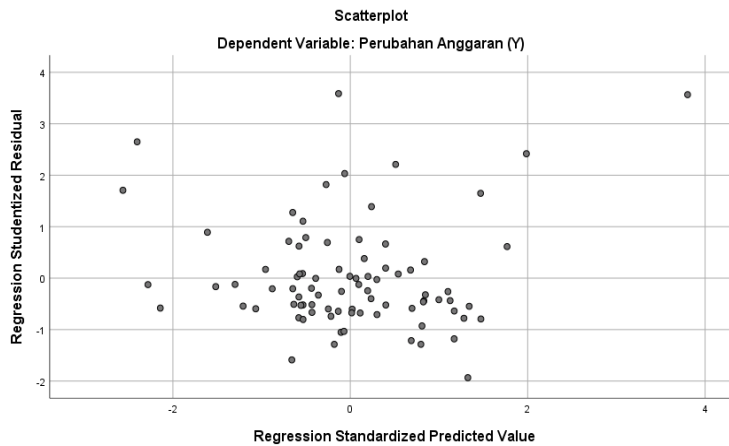
Hasil pengujian normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,200 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi ini berdistribusi normal dan asumsi normalitas dapat diterima.

Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kapasitas Manajemen Keuangan (X1)	,990	1,010
	Varians Belanja (X2)	,991	1,009
	Perubahan SiLPA (X3)	,998	1,002

RESEARCH ARTICLE

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen menghasilkan nilai VIF < 10,0 dan nilai Tolerance > 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas atau korelasi yang kuat antar variabel independen. Oleh karena itu, model regresi ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.



Gambar 3. Hasil pengujian Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.626	0.392	0.369	0.06997	2.043

Hasil dari pengujian ini dilihat dari tabel Durbin-Watson memiliki nilai 2,043, sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 diperoleh nilai d sebesar 2,043, nilai dL sebesar 1,575 dan nilai dU sebesar 1,721. Kemudian nilai  $4 - dL = 2,425$  dan  $4 - dU = 2,279$ . Dimana nilai tersebut berada di antara ( $dU < d < 4 - dU$ ) atau  $1,721 < 2,043 < 2,279$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tabel tersebut tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 5. Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.626	0.392	0.369	0.06997

Hasil menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,369. Berdasarkan nilai koefisien determinasi tersebut, diperoleh nilai sebesar 0,369, yang berarti sebesar 36,9% variasi dalam Perubahan Anggaran dapat dijelaskan oleh variabel Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah, Varians Belanja, dan P-SiLPA. Sementara itu, sisanya yakni 63,1% dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain di luar variabel yang dianalisis pada penelitian ini.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 6. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0.424	0.297	0.022	-1.425	0.158
1 Kapasitas Manajemen Keuangan (X1)	0.037	0.184	0.215	0.203	0.839
Varians Belanja (X2)	0.660	0.326	0.223	2.022	0.046
Perubahan SiLPA (X3)	0.118	0.056	0.022	2.105	0.038

Hasil menunjukkan bahwa variabel Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sedangkan variabel Varians Belanja berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran, dan variabel P-SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 7. Uji Signifikansi Simultan Penelitian (Uji-F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0.255	3	0.085	2.780	0.046
Residual	2.479	81	0.031		
Total	2.734	84			

Hasil menunjukkan bahwa nilai uji F sebesar 2,780 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,046 < 0,05. Hasil diperoleh untuk F tabel adalah 2,717, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah, Varians Belanja, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran secara simultan.

**4.2 Pembahasan**

Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel kapasitas manajemen keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan variabel kapasitas manajemen keuangan daerah memiliki t-hitung sebesar 0,203 yang lebih kecil dari t-tabel 1,663 dan nilai signifikansi 0,839 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa kapasitas manajemen keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan anggaran, dengan begitu dapat ditetapkan bahwa H1 ditolak. Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu tidak hanya menilai hasil keuangan, tetapi juga mencerminkan kemampuan daerah dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi anggaran secara menyeluruh. Persamaan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Novelsyah & Nor (2022) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran, bahwa besar kecilnya kemandirian keuangan tidak dapat digunakan sebagai prediktor dalam perubahan anggaran belanja. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian Fahrinda & Kuntadi (2022) yang hasilnya menyatakan bahwa PAD (kemandirian keuangan) berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran daerah. Artinya, daerah yang memiliki PAD lebih tinggi cenderung melakukan penyesuaian anggaran selama periode berjalan. Adapun dampak penelitian ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dan efisien dalam merespon ketidaksesuaian antara anggaran awal dan realisasinya, penelitian ini membantu memahami faktor-faktor yang menyebabkan perubahan anggaran belanja daerah, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Varians Belanja berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel varians belanja memiliki t-hitung sebesar 2,022 yang artinya lebih besar dari t-tabel 1,663 dan nilai signifikansi 0,046 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel varians belanja berpengaruh positif signifikan

## RESEARCH ARTICLE

terhadap perubahan anggaran, dengan begitu dapat ditetapkan bahwa H2 diterima. Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu mampu menunjukkan sejauh mana belanja direalisasikan sesuai rencana. Persamaan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junita (2018) yang dalam penelitiannya ditemukan bahwa varians belanja secara simultan memengaruhi perubahan anggaran (PAB) saat diuji bersama variabel lainnya, menunjukkan varians ini menjadi salah satu pemicu perubahan anggaran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Ayuni dkk (2023) menunjukkan bahwa variabel varians belanja tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran. Meskipun terdapat varians antara anggaran dengan realisasi belanja, hal tersebut belum cukup kuat mendorong terjadinya perubahan anggaran. Dampaknya bagi masyarakat adalah meningkatnya efektivitas alokasi belanja publik, karena anggaran yang sebelumnya belum terserap bisa dialokasikan kembali ke sektor-sektor yang lebih prioritas dan berdampak nyata. Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel perubahan sisa lebih perhitungan anggaran (P-SiLPA) memiliki t-hitung sebesar 2,105 yang artinya lebih besar dari t-tabel 1,663 dan nilai signifikansi 0,038 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel P-SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan anggaran, dengan begitu dapat ditetapkan bahwa H3 diterima. Penelitian ini memiliki kelebihan karena mampu menggambarkan akurasi perencanaan keuangan di tahun sebelumnya. Berfungsi sebagai indikator kapasitas serapan anggaran dan ketepatan alokasi, dan sangat terkait dengan ketersediaan dana lanjutan pada tahun berjalan. Persamaannya pada penelitian Rahmawati (2023) yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Lubis & Ritonga (2021) hasilnya menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja, artinya SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena tidak memiliki daya dorong langsung terhadap kebijakan belanja jangka panjang. Dampaknya, peningkatan SiLPA mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perubahan anggaran, khususnya pada belanja daerah, guna mengoptimalkan pemanfaatan dana yang tersisa dari tahun sebelumnya.

Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah, Varians Belanja, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa ketiga variabel memperoleh F-hitung sebesar 2,780 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,046. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 ( $0,046 < 0,05$ ). Karena F hitung ( $2,780 > F$  tabel ( $2,717$ )), maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan anggaran. Sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan kapasitas manajemen keuangan daerah, varians belanja, dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. Kelebihan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mendorong perubahan anggaran di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adanya penggunaan variabel yang sama serta memiliki hasil yang simultan berpengaruh terhadap perubahan anggaran. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Rizqiyati dkk (2019) yang menyatakan bahwa PAD dan SiLPA secara bersama-sama memengaruhi perubahan anggaran belanja, yang dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kapasitas fiskal pada pertengahan tahun anggaran. Perbedaannya pada penelitian Ayuni dkk (2023) menemukan bahwa hanya SiLPA yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja, sedangkan varians belanja tidak. Dampaknya, ketiga penelitian tersebut menegaskan bahwa PAD, SiLPA, dan varians belanja memiliki peran strategis dalam memengaruhi perubahan anggaran, terutama dalam konteks belanja modal dan belanja daerah secara umum.

## 5. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian yang tertuang dalam penulisan artikel ini, dapat diketahui bahwa Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, hipotesis menunjukkan bahwa variabel Varians Belanja dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA) secara parsial berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, diharapkan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat mengoptimalkan realisasi APBD terhadap anggaran yang telah ditetapkan sehingga tidak memicu terjadinya perubahan anggaran baik pada pendapatan maupun belanja pada tahun berjalan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar dapat menambahkan variabel rasio perubahan anggaran lainnya agar dapat memberikan cakupan penelitian yang lebih luas lagi. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

## 6. Referensi

- Amelia, F., & Khoiriawati, N. (2022). Analisis SILPA sebagai alat ukur pengelolaan APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.141>.
- Armereo, C., Marzuki, A., & Seto, A. A. (2020). *Buku Ajar Manajemen Keuangan*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.
- Ayuni, Q., Sari, Y., & Dwitayanti, Y. (2023). Analisa pengaruh SILPA dan varians anggaran belanja kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(5), 1869–1877. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1488>.
- Fahrinda, Y., & Kuntadi, C. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran pemerintah daerah. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(3), 449–456.
- Junita, A. (2018). Perubahan anggaran, partisipasi anggaran, dan gaya kepemimpinan pada pemerintah daerah (bukti empiris dari perspektif goal-setting pada satuan kerja perangkat daerah di Aceh). *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, 2(2), 93–107. <https://doi.org/10.33059/jensi.v2i2.938>.
- Kurniawan, A., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh fiscal stress, varians anggaran dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap perubahan anggaran belanja pada pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1275–1292.
- Lubis, F. A., & Ritonga, S. (2021). Pengaruh dana perimbangan dan dana sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) terhadap belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9517–9524. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2514>.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>.

## RESEARCH ARTICLE

- Masnila, N., Mayasari, R., Firmansyah, F., Febriantoko, J., & Said, J. (2021). The effect of good government governance on the financial reports quality: The case of provincial capital governments in Indonesia. *International Journal of Business, Management and Economics*, 2(4), 270–287. <https://doi.org/10.47747/ijbme.v2i4.385>.
- Mayasari, R. (2022). *Buku Monograf Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilaiannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Africano, F., & Loressas, M. (2021). Efisiensi dan efektivitas belanja langsung pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 180–189. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.4172>.
- Novelsyah, M., & Nor, W. (2022). Model prediksi perubahan anggaran belanja daerah pada kabupaten kota di Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 15(1), 401–410. <https://doi.org/10.35143/jakb.v15i1.5296>.
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belu. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 1–6.
- Pangestu, K. D., & Andriana, N. (2022). Financial ratio analysis in assessing the financial performance of the regional government of Pematang Regency. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 2006–2008. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6430>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (2022).
- Rahmawati, R. (2023). Analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada pemerintah daerah Kabupaten Berau. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 794–803. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1019>.
- Rizqiyati, C., Dedy Perdana, H., & Setiawan, D. (2019). Determinan perubahan anggaran belanja modal. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 83–96.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-3). Bandung: Alfabeta.